



Jejak Intelektualisme Islam Indonesia

Judul Buku : Islam in Indonesia, The Contest
for Society, Ideas, and Values
Penulis : Carool Kersten
Penerbit : Hurst & Company, London
Tahun Terbit : 2015
Tebal : i-xx, 373 halaman

Memahami jejak perjalanan sebuah bangsa bisa ditelusuri dari sepek terjang kaum intelektualnya. Buku ini mencoba merekam kompleksitas dan kontestasi pemikiran kaum intelektual muslim di Indonesia pasca Reformasi. Buku karya Carool Kersten ini bisa dikatakan sebagai sekuel dari buku pertamanya yang berjudul *Cosmopolitans and*

Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam yang fokus kajiannya adalah sejarah pemikiran Nurcholish Madjid (1939-2005). Sebagai salah satu pemerhati islam Indonesia terkemuka saat ini, Kersten mencoba memetakan proses polarisasi umat islam Indonesia dengan bertitik tolak dari isu pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Baginya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

yang mengharamkan pluralisme, liberalisme dan sekularisme bisa dijadikan tes lakmus (litmus test) untuk mengukur polarisasi kelompok dan aktivis muslim di Indonesia.

Dengan melihat proses antagonisme dan polarisasi ini, Kersten mempertanyakan masa depan islam di Indonesia terkait kebebasan beragama dan toleransi beragama yang berimplikasi secara lebih luas pada bagaimana status hak azasi universal, proses demokratisasi yang berlangsung dan seberapa optimis kita bisa mempertahankannya, serta ke depan Indonesia akan menjadi negara seperti apa. Namun demikian, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sebetulnya punya alternatif jalan ketiga (third way) yang selama ini diambil untuk tidak terjebak pada negara sekuler dan negara islam. Hal ini bisa perlu terus diupayakan oleh para tokoh intelektual dan aktivis muslim agar mampu melakukan proses konsolidasi dan transformasi pemikiran bagi masa depan demokratisasi di Indonesia.

Secara umum, buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama memuat sketsa sejarah diskursus islam dalam politik dan peran intelektual di awal dekade milenium ketiga, yaitu awal jatuhnya rezim Soeharto hingga apa yang disebut Kersten sebagai lima tahun awal turbulensi era reformasi (1999-2004). Bab kedua memetakan lanskap intelektual muslim di Indonesia terutama perkembangan pemikiran progresif baik yang diwarisi secara individual maupun

dalam bentuk lembaga-lembaga sosial. Bab ketiga merupakan kelanjutan dari bab kedua yang membahas tentang buah dari persemaian pemikiran progresif yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh intelektual generasi awal. Hal ini bisa dilihat dari karya-karya yang diterbitkan dan lembaga-lembaga kajian yang bermunculan di berbagai daerah. Bab keempat mengulas tentang relasi agama dan negara. Perdebatan seputar Pancasila dan Piagam Jakarta. Bab kelima merupakan kelanjutan bab keempat namun lebih fokus pada masalah hukum islam misalnya isu Perda Syariat Islam banyak diulas di bagian ini. Bagian terakhir membahas tentang perdebatan antara kelompok progresif dan reaksioner tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme.

Kaum Muda dan Kematangan Intelektual

Dari berbagai isu yang dibahas di dalam buku ini, ada tiga *point* penting yang menarik untuk diulas dalam tulisan ini adalah. *Pertama*, perubahan penting yang terjadi di Indonesia di awal abad ke-21 dan membawa harapan baru dalam wacana perkembangan intelektual islam. Menurut Kersten, ada proses pembaharuan diskursus islam yang menjadi penanda perkembangan politik post Soeharto, yaitu reinterpretasi Al-Qur'an, aktualisasi tradisi, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pribumisasi islam dan orientasi masa depan islam.

Kedua, Kersten melihat bahwa optimisme dan harapan baru pasca reformasi juga berpengaruh terhadap proses berpikir umat islam dalam memandang Islam baik secara spiritual maupun secara analitis agar tetap relevan dalam kehidupan. Berbagai ide-ide inovatif yang menurutnya patut dibanggakan misalnya kontribusi intelektual muda dalam pembentukan diskursif (*discursive formations*) yang berasal dari kaum muda dengan latar belakang pesantren namun mampu berpikir kreatif dan melahirkan ide-ide segar dan kritis. Di berbagai daerah bermunculan klaster-klaster sarjana muslim yang mencoba melakukan reinterpretasi dan reformulasi pemikiran keagamaan, misalnya Mazhab Ciputat di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Mazhab Jogja atau Mazhab Sapen di IAIN Sunan Kalijaga. Kaum muda progresif juga bermunculan di luar lingkaran akademis misalnya Jaringan Islam Liberal (JIL), Anak/Kaum Muda NU dan Intelektual Muda NU, serta Jaringan Intelektual Muhammadiyah Muda (JIMM).

Munculnya pemikiran progresif di kalangan muda ini menurut Kersten juga dipengaruhi oleh hasil persemaian (*seedbeds*) tokoh intelektual muslim postkolonial generasi kedua dan ketiga, misalnya Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam yang didengungkan oleh Nurcholish Madjid di awal tahun 70-an. Buah pemikirannya kemudian berkembang menjadi Yayasan Paramadina yang didirikan dan berdirinya Universitas Para-

madina. Inilah salah satu interlokutor penting yang sampai saat ini menandai diskursus islam kontemporer di Indonesia. Tokoh lain yang juga berpengaruh luas dalam perkembangan intelektualisme islam Indonesia adalah Dawam Rahardjo, di awal tahun 1971, ia mendirikan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Lembaga ini berperan penting dalam proses reformasi pesantren dan melahirkan pemimpin-pemimpin dan kader-kader baru di kalangan pesantren. Di tahun 1987, ia juga mendirikan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan terlibat dalam proses pendirian Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di tahun 1992. Lembaga ini menurutnya bukan saja menjadi pusat kajian (*research center*) akan tetapi juga berperan dalam proses pertukaran pemikiran dari dunia Islam melalui penerbitan dan penerjemahan pemikiran progresif tokoh-tokoh intelektual muslim.

Faktor lain yang ikut memengaruhi perkembangan inovatif dalam pemikiran keislaman adalah munculnya organisasi non pemerintah (NGO). Salah satunya adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Lembaga yang berdiri tahun 1983 ini merupakan kelanjutan dari proses reformasi pesantren yang berlangsung sejak tahun 70-an dan merupakan salah satu agenda penting Nahdlatul Ulama pasca Mukhtar 1984 sebagai wadah pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat bawah (*grassroot-level*). Lembaga lain yang dalam istilah Kersten menjadi

inkubator intelektual NU adalah di tahun 1985 berdiri Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) di Jakarta dan di tahun berikutnya berdiri Lembaga Kajian Pesantren dan Sumber Daya Manusia (LKPSM) di Yogyakarta, dan di tahun 1999 berdiri Fahmina Institute di Cirebon.

Di tahun 2000-an, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga *think tanks* yang punya perhatian khusus dalam mempromosikan dan mengembangkan pemikiran islam untuk melanjutkan warisan intelektual yang telah dirintis generasi yang lebih tua semakin berkembang. Di antaranya adalah Freedom Institute yang berdiri tahun 2001, Indonesia Institute di tahun 2002, Reform Institute di tahun 2003 (kini sudah mati), dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) di tahun 2005. Lembaga-lembaga ini secara tidak langsung merupakan kelanjutan dan pelestarian pemikiran islam inovatif yang telah dirintis oleh Nurcholish Madjid di tahun 70-an. Lembaga lain yang juga mendorong terhadap perkembangan pemikiran progresif adalah Maarif Institute (2003) yang didirikan oleh Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua PP Muhammadiyah) dan Wahid Institute (2004) yang didirikan oleh Gusdur/Abdurrahman Wahid (Mantan Ketua PB Nahdlatul Ulama).

Namun demikian, ada kelompok antagonis yang menurut Kersten menentang dan menjadi destraktor terhadap wacana dan pemikiran yang

dikembangkan oleh intelektual muslim progresif. Akar sejarah intelektual dari kelompok ini, menurutnya bisa dirunut dari dua figur intelektual Muhammad Natsir (1908-1993), mantan ketua Masyumi dan mantan Menteri Agama Muhammad Rasjidi (1915-2001) yang kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Selain itu, figur lain yang menurut Kersten sangat getol dan menyerang pemikiran progresif intelektual muslim indonesia adalah Adian Husaini. Beberapa figur lain yang sangat menentang terhadap pemikiran liberal islam adalah beberapa aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seperti Ismail Yusanto, Rokhmat S. Labib, Hafidz Abdurrahman dan Fahmi Amhar. *Ketiga*, kematangan intelektual di Indonesia yang telah melalui proses adaptasi, kritik dan transformasi pemikiran yang terus berlangsung antar generasi. Ia mengeksplorasi kritisisme pemikiran kaum intelektual muda yang tidak terjebak dalam kejumudan dan selalu mencari jalan alternatif. Ia mencontohkan apa yang terjadi di tubuh NU dalam mencoba mengkaji dan mendefinisikan ulang konsep Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja) mulai dari pemikiran Ahmad Siddiq (1926-1991) untuk lebih terbuka dalam membaca kembali konsep Aswaja, analogi dan interpretasi Gusdur antara teologi pembebasan (liberation theology) dan konsep Aswaja sebagai sebuah agenda keadilan sosial dan spirit kemanusiaan. Generasi selanjutnya yang mencoba melakukan reinterpretasi

Aswaja adalah Said Aqil Siradj melalui bukunya *Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah* (1995). Rumadi dengan disertasinya tentang Komunitas Postra dan Ahmad Baso dengan *NU Studies*-nya.

Proses kematangan intelektual juga terjadi di tubuh Muhammadiyah, Kersten mencontohkan pengembangan teori sosial dan kritisisme budaya yang terbentuk dalam formasi diskursif islam transformatif yang dirintis oleh para tokoh senior Muhammadiyah seperti Kuntowijoyo, Dawam Rahardjo, Munir Mul Khan, Amin Abdullah dan Moeslim Abdurrahman telah membawa perubahan besar terhadap fungsi intelektual dalam proses transformasi sosial. Tradisi intelektualisme ini kemudian dilanjut-

kan oleh generasi muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muhammadiyah Muda (JIMM).

Menurut Kersten, pertimbangan-pertimbangan epistemologis yang terbentuk dalam formasi diskursif pemikiran progresif muslim yang lahir dari generasi muda NU dan Muhammadiyah merupakan penanda lahirnya intelektualisme muslim di awal abad ke-21 yang melihat bahwa dalam konteks Indonesia kontemporer bukan perkara mendirikan sebuah negara islam atau memperkenalkan hukum islam akan tetapi bagaimana terciptanya demokratisasi, toleransi, kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. []